

## USAI KEMARAU KERING BERKURANG

# BMKG Prediksi, Hujan Mulai November

JAKARTA (KR) - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim hujan baru terjadi sekitar bulan November 2023 mendatang usai musim kemarau kering berkurang intensitasnya pada Oktober.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, puncak musim kemarau kering terjadi pada pertengahan Agustus hingga September dengan intensitas panas yang semakin meningkat. "Nanti setelah masuk Oktober, mulai berkurang, berkurang tapi masih kering. Nah diprediksi hujan ini November," kata Dwikorita di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/8).

Dwikorita menjelaskan, fenomena cuaca El Nino masih terjadi. Bahkan semakin memuncak pada Oktober-November. Di sisi lain, Indonesia diuntungkan dengan datangnya musim hujan mulai November. Namun, kondisi berbe-

da di kawasan Nusa Tenggara Barat dan Timur, serta Papua Selatan, yang diprediksi masih terjadi kemarau kering cukup kuat hingga awal Desember.

Oleh karena itu, kata Dwikorita, perlu diantisipasi terkait ketahanan pangan di wilayah tersebut karena mengeringnya sumber air. "Memang kalau kita lihat di lapangan, sungai-sungai sudah kelihatan mulai mengering ya, bantarnya yang biasanya tertutup air sudah bisa untuk main sepakbola kali ya, karena sudah mulai mengering," kata Dwikorita.

Dengan musim kemarau kering yang masih terjadi hingga September ini, ia ju-

ga mengingatkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pada Jumat (4/8) kawasan hutan di Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengalami kebakaran dan api terlihat menjalar sehingga menimbulkan asap.

Dwikorita menjelaskan, wilayah NTT dan NTB memang sudah tidak memiliki curah hujan, sehingga gesekan ranting pun dapat mengakibatkan terjadinya karhutla. "Wilayah Nusa Tenggara Barat-Timur ini kalau di dalam peta sudah terlihat warnanya itu semakin hitam. Ini semakin kering, artinya curah hujannya ini sudah mendekati nol, sehingga secara alamiah pun anginnya kencang, gesekan ranting itu juga terbukti," katanya.

Kendati demikian, Kepala BMKG menyebut musim kemarau dan kekekeringan di Indonesia tidak akan separah kondisi di Korea Selatan. (Ant/San)-d

## KAPUSPEN TNI SOAL ANGKATAN SIBER

# Ideal, Namun Harus Dikaji Ilmiah

JAKARTA (KR) - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksda TNI Julius Widjojono menilai, usulan pembentukan Angkatan Siber untuk melengkapi tiga matra TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara) merupakan proyeksi yang ideal, namun butuh dikaji secara ilmiah.

Ya mencontohkan, Angkatan Siber bukan hal yang baru, karena beberapa negara salah satunya Amerika Serikat telah membentuk Angkatan Siber pada 2010. "Kalau saya melihat ini harus dikaji secara ilmiah, sangat ideal memang, kalau di Amerika beberapa tahun yang lalu punya USCYBERCOM (United States Cyber Command)," kata Laksda Julius di Mabes

TNI, Jakarta, Rabu (9/8).

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Andi Widjajanto pada sela-sela Seminar Nasional 'Ketahanan Nasional Transformasi Digital Indonesia 2045' di Jakarta, Senin (7/8), mengusulkan pembentukan Angkatan Siber sebagai angkatan keempat dari tiga matra TNI.

Julius menjelaskan, jika Indonesia juga ingin membentuk Angkatan Siber, tentu harus memikirkan struktur organisasi dan kelemahannya di TNI, termasuk terkait rekrutmen dan jenjang kariernya. Tugas pokok, dan fungsi Angkatan Siber juga perlu dikaji, karena saat ini ada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Satuan Siber TNI, dan lain-lain. (Ant/San)-f

## BRI LIGA 1 2023/2024

# PSIS Tambah Derita Arema FC

SEMARANG (KR) - Derita Arema FC makin bertambah di pekan ketujuh BRI Liga 1 2023/2024. Rabu (9/8). Arema FC takluk di tangan tuan rumah PSIS Semarang dengan dua gol tanpa balas di Stadion Jatidiri Semarang.

Kekalahan ini membuat rekor buruk tim pujaan Aremania tersebut tak kunjung berakhir. Dalam tujuh pertandingan, Arema FC belum sekalipun memetik kemenangan. Arema FC kini masih terkutat di posisi dasar klasemen dengan hanya mengumpulkan dua poin.

Sejatinya, pertandingan kedua tim berjalan seimbang. Kedua tim sama-sama aktif melancarkan serangan. Beberapa kali, Arema mencoba menyerang mengandalkan sosok Dedik Setiawan, namun masih mentah di pertahanan PSIS. Begitu pula dengan PSIS, sejumlah peluang didapat melalui Boubakary Diarra, hanya saja belum membuahkan gol. Kedua tim pun bermain sama kuat tanpa gol hingga babak pertama berakhir.

Babak kedua, Arema mencoba mengam-

bil tempo permainan. Charles Almeida membuat peluang dari luar kotak penalti, namun melesar jauh dari gawang PSIS pada menit 65. Hanya dua menit kemudian, Arema justru kecolongan. Septian David Maulana mencetak gol lewat eksekusi sepak pojok.

Septian David kembali mencatatkan namanya di papan skor menit 75. Menuntaskan umpan silang dari Paulo Gali Freitas, Septian David mencetak gol dengan mudah. Keunggulan PSIS dua gol pun bertahan hingga laga usai. PSIS kini mengemas 11 poin hasil tujuh pertandingan yang sudah dijalani.

Pada laga lainnya, Barito Putera mengatasi tamunya Dewa United dengan skor 2-1 di Stadion Demang Lehman Martapura. Dua gol Barito Putera disarangkan Gustavo Tocantins dan Eksel Runtukahu. Sedangkan gol Dewa United dicetak Egy Maulana Vikri. Mengoleksi 13 poin, Barito Putera berada di papan atas klasemen sementara. Sementara Dewa United mengoleksi 11 poin. (Yud)-f

## TEBING KALI SENOWO LONGSOR

# Material Menumpuk di Tengah Aliran

MAGELANG (KR) - Tanah tebing di tepi aliran Kali Senowo di Dusun Trono, Desa Krinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, longsor. Material longsor menumpuk di aliran Kali Senowo dan membendung aliran sungai yang berhulu di kaki Gunung Merapi tersebut.

Kepala Pelaksana Harian (Kalahar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang Edi Wasono SH di Puskalops BPBD Kabupaten Magelang, Rabu (9/8) mengatakan, tanah tebing yang longsor memiliki ketinggian sekitar 40 meter dan lebar 30 meter. Longsor juga berdampak pada keberadaan

sumber mata air dan kebutuhan air bersih masyarakat.

Dikhawatirkan longsor bisa terjadi lagi, mengingat di sekitar lokasi tebing yang longsor juga terdapat retakan tanah. Menurut Edi Wasono, kemiringan tebing cukup terjal, kondisi tanahnya pasir vulkanik yang kurang kompak dan padat. Pada saat terjadi longsor, di lokasi sama sekali tidak turun hujan. Jarak antara lokasi tebing yang longsor dengan kawasan permukiman penduduk sekitar 1,5 km, sedangkan jarak antara lokasi longsor dengan puncak Gunung Merapi sekitar 5-6 km.

Kepala Desa Krinjing Ismail kepada KR membenarkan, kejadian longsor tebing tepi aliran Kali Senowo tersebut juga berdampak pada kebutuhan air bersih masyarakat, khususnya di Dusun Trono. Dusun Trono merupakan salah satu dusun tertinggal di Desa Krinjing, dan letaknya tidak jauh dari Pos Pengamatan Gunung Merapi di Babadan, Kecamatan Dukun. (Tha)-f



KR-Dok BPBD Kabupaten Magelang

Material longsor menutup aliran Kali Senowo di wilayah Dusun Trono, Desa Krinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.

## MASALAH KLITHIH BELUM SELESAI

# Satpol PP DIY Terus Lakukan Patroli dan Razia



KR-Wawan Isnawan

Drs Noviar Rahmad MSI

YOGYA (KR) - Masalah kejahatan jalanan atau klithih di Yogya, belum selesai. Meskipun akhir-akhir ini tidak terlihat ada kejadian klithih, bukan berarti masalah ini telah hilang.

"Kasus kekerasan jalanan ini sifatnya kambuhan yang bisa terjadi lagi sewaktu-waktu," terang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY Drs Noviar Rahmad MSI kepada KR di kantor Satpol PP DIY, Rabu (9/8).

Dijelaskan Noviar, kejahatan jalanan ini basisnya adalah genk sekolah atau genk berbasis sekolah. Maksudnya tidak didirikan oleh sekolah dan berada di luar sekolah, tapi berbasis sekolah. Dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY terdapat 117 genk berbasis sekolah mulai SMP, SMA dan SMK.

Untuk mencegah kejahatan jalanan ini, menurut Noviar, saat ini Satpol PP bersama kepolisian terus melakukan patroli (malam-pagi) di seluruh DIY. Targetnya tempat tongkrongan di pinggir jalan. "Kalau kedatangan ada anak yang nongkrong sampai larut malam, kami suruh pulang. Begitu pula jika bertemu anak di jalan kami suruh pulang," katanya.

Selain itu, Satpol PP bersama kepolisian melakukan razia minuman keras (miras),

karena miras menjadi awal kejahatan jalanan. "Setelah menenggak miras, biasanya mereka akan melakukan aksi vandalisme lalu mereka janji antargenk untuk bertarung," ujar Noviar.

Satpol PP DIY bekerja sama dengan pihak sekolah juga melakukan program 'Satpol PP Goes To School', yaitu mendatangi sekolah-sekolah saat jam istirahat untuk melakukan pengecekan tas siswa dan jok motor siswa dari miras dan senjata tajam. Kegiatan patroli (malam-pagi), razia miras dan 'Satpol PP Goes To School' telah berlangsung sejak awal tahun ini (Januari 2023) hingga sekarang.

Program selanjutnya, menurut Noviar, yaitu peningkatan kapasitas Jaga Warga melalui program pendampingan. Sebab kelompok Jaga Warga yang dibentuk di tingkat padukuhan/kampung, adalah yang paling memahami siapa (warga) yang berpotensi melakukan kejahatan jalanan. Tahun 2021 telah dilakukan sebanyak 1.200 pendampingan untuk Jaga Warga, dan tahun 2022 sebanyak 800 pendampingan.

"Anggota Jaga Warga kami berikan materi bagaimana peran Jaga Warga dalam melakukan pencegahan kejahatan jalanan, dan materi bagaimana membuat kegiatan-kegiatan positif bagi anak-anak yang dinilai

berpotensi melakukan kejahatan jalanan. Jadi peran Jaga Warga sangat penting," kata Noviar.

Maret 2023, pihak kepolisian juga sudah menaungkan program Polisi RW Jaga Warga, di mana satu orang polisi mendampingi satu kelompok Jaga Warga. Mereka saling berkoordinasi dalam mengamankan lingkungan padukuhan/kampung masing-masing.

Menurut Noviar, upaya-upaya tersebut dilakukan untuk mempersempit gerak dan tempat bertemunya antargenk. Adapun kejahatan jalanan berupa pembacokan secara random itu saat genk motor sedang merekrut anggota baru. "Seperti mengajari cara membacok bagi anggota baru, kira-kira seperti itu," katanya.

Noviar juga menjelaskan, berdasarkan penelusuran kepolisian, Satpol PP dan DP3AP2 diduga kuat ada aliran dana di situ, sehingga organisasi/genk ini bisa bertahan lama. Salah satunya melalui iuran anggota untuk membeli miras atau senjata tajam yang disimpan dengan cara ditanam di kebun-kebun.

Kemudian jika ada anggota yang ketahuan melakukan kejahatan jalanan akan lari ke luar kota dan di sana sudah ada yang melindungi. Dari situ, Satpol PP DIY dan Polda DIY mensinyalir bahwa kejahatan jalanan ini by

design (atau dirancang). "Tapi kami belum bisa membuktikan ini (by design), karena perlu ada pembuktian soal itu," katanya.

Disinggung soal hukuman penjara bagi pelaku kejahatan jalanan, Noviar mengatakan, terkait pidana merupakan kewenangan kepolisian. Noviar setuju jika pelaku tindak pidana kejahatan jalanan diproses sampai ke pengadilan, sedangkan yang belum melakukan kejahatan jalanan diproses sesuai undang-undang yaitu dilakukan pembinaan.

"Tapi persoalannya, pelaku tindak pidana kejahatan jalanan yang dihukum penjara, setelah keluar penjara pasti menjadi ketua genk, dan akan menjadi beringas lagi," katanya.

Oleh karena itu, Noviar sangat setuju dan mendorong segera dibentuknya Satgas Pencegahan Kejahatan Jalanan (lintas sektor) yang menjadi wadah bagi semua stakeholders, agar gerakannya terpadu dan efektif. Pasalnya, saat ini gerakan dalam rangka pencegahan kejahatan jalanan masih jalan sendiri-sendiri.

"Kalau ada wadah (satgas) maka antarstakeholders akan terkoneksi, kalau ada kekurangan juga bisa dilakukan evaluasi. Kami juga berharap ke depan segera dirumuskan resep/formula pencegahan kejahatan jalanan ini mulai hulu sampai hilir, sehingga kasus klithih ini tidak terjadi lagi di Yogya," katanya.

Noviar mengajak semua pihak untuk menciptakan kondisi Yogya yang aman. Banyak kelompok masyarakat yang menawarkan siap membantu aparat keamanan. "Tapi kami tidak berharap mereka melakukan tindakan hukum sendiri, yang kami harapkan turut melakukan pencegahan, yaitu dengan memperbanyak menyebarkan kegiatan anak-anak muda ke hal-hal positif," pungkasnya. (Dev/Wan)

## SOAL BEBASNYA GAZALBA SALEH

# KPK Akhirnya Ajukan Kasasi

JAKARTA (KR) - Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima salinan putusan lengkap atas putusan Pengadilan Tipikor Bandung yang memvonis bebas Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dalam kasus pidana suap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. Oleh karena itu, langkah hukum yang ditempuh KPK adalah mengajukan kasasi atas putusan tersebut.

"Jaksa KPK Arif Rahman Irsady telah selesai menyatakan kasasi atas putusan bebas terdakwa Gazalba Saleh," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (9/8).

Ia menjelaskan, pernyataan kasasi diajukan dan terdaftar melalui panitera

pada PN Bandung Kelas 1A Khusus. Ali mengungkapkan, tim jaksa KPK telah menerima salinan putusan lengkap. Oleh karena itu, saat ini sedang dalam proses penyusunan memori kasasi.

Seperti diberitakan, Gazalba Saleh divonis bebas oleh majelis hakim dalam sidang putusan kasus suap atas perkara pidana KSP Intidana di Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa (1/8). Dalam persidangan itu, Majelis Hakim yang dipimpin Joserizal memutuskan terdakwa Gazalba tidak terbukti bersalah. Hal ini dengan alat bukti yang disodorkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK tidak kuat, sehingga terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan.

Sebelumnya Gazalba

Saleh didakwa menerima uang sebesar 20 ribu dolar Singapura untuk pengurusan perkara kasasi pidana terhadap pengurus KSP Intidana Budiman Gandi. Uang yang berasal dari penggugat Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma itu diberikan pengacara mereka, Yosef Parera dan Eko Suparno, kepada Desy Yustria sebesar 110 ribu dolar Singapura.

Desy Yustria kemudian memberikan uang kepada Nurmanto Akmal sebesar 95 ribu dolar Singapura. Sebesar 10 ribu dolar Singapura diberikan kepada Desy Yustria untuk pengurusan perkara.

Selanjutnya, uang senilai 55 ribu dolar Singapura diberikan kepada Redhy. Redhy kemudian memberikan uang 20 ribu dolar Singapura kepada terdak-

wa Gazalba Saleh melalui perantara Prasetio Nugroho.

JPU KPK menuntut Gazalba Saleh dengan hukuman penjara selama 11 tahun dan denda Rp 1 miliar. Gazalba dinilai terbukti menerima suap menyangkut perkara kasasi KSP Intidana dengan terdakwa Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma.

Gazalba diyakini melanggar Pasal 12 huruf C jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan alter-natif pertama. (Ful)-d

## GELAR PERKARA DUGAAN TPPU PANJI GUMILANG Bareskrim Butuh Tambahan Keterangan Saksi

JAKARTA (KR) - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, Rabu (9/8) melakukan gelar perkara untuk menaikkan status penyelidikan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diduga dilakukan Panji Gumilang, Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun ke tahap penyidikan. Namun, hasil gelar perkara yang dihadiri penyidik dan pengawas eksternal Bareskrim Polri belum dapat memutuskan untuk menaikkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan, karena masih diperlukan penambahan keterangan saksi serta dokumen yang harus dilengkapi.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan mengatakan, dari 37 saksi yang diundang untuk dimintai klarifikasinya, baru 19 saksi yang hadir dan 18 orang lainnya masih ditunggu keterangannya. "Dari 37 saksi yang kami undang, baru 19 saksi (berikan keterangan) ya, ini masih menunggu," ujarnya.

Penyidik menunggu para saksi untuk hadir memberikan keterangan pada Kamis (10/8) dan Jumat (11/8). Setelah seluruh keterangan saksi selesai digali, selanjutnya penyidik melaksanakan gelar perkara lanjutan untuk memutuskan naik atau tidaknya kasus tersebut ke tahap penyidikan. "Mudah-mudahan minggu depan kami akan melaksanakan gelar perkara lanjutan," katanya.

Menurut jenderal bintang satu itu, penyidik harus cermat dalam penanganan perkara tersebut, tidak ingin terburu-buru memutuskan tanpa didukung bukti, dokumen dan keterangan yang cukup. "Perkara ini harus lebih cermat karena itu kami membutuhkan dokumen, surat petunjuk yang sangat lengkap dan ditambah keterangan ahli. Karena ini menyangkut dengan undang-undang yayasana, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang," katanya.

Adapun 18 saksi yang bakal diperiksa tersebut berasal dari Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) Ponpes Al Zaytun, keterangan dari masyarakat yang mengirimkan dana, dan juga dari Kementerian Agama. Proses gelar perkara yang dilaksanakan hari ini berlangsung selama delapan jam. Dalam proses itu, penyidik menampikan beberapa informasi, bukti dan fakta.

(Ant/Has)-f